

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang terbatas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional (Undang-undang No. 26 Tahun 2007).

Istilah wilayah mengacu pada pengertian unit geografis, secara lebih jelasnya wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografis dengan batas-batas tertentu yang komponen-komponen penyusunnya mempunyai hubungan secara fungsional satu dengan yang lainnya. (Rustiadi et al., 2009)

Pengembangan wilayah diartikan sebagai upaya pembangunan pada suatu wilayah atau beberapa daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memanfaatkan sumber-sumber daya (alam, manusia, kelembagaan, teknologi, dan prasarana) secara efektif, optimal, dan berkelanjutan dengan cara merangsang kegiatan-kegiatan produktif (sektor primer, sekunder, dan tersier), penyediaan fasilitas pelayanan (ekonomi dan sosial), penyediaan prasarana dan sarana serta perlindungan lingkungan (Adisasmita, 2006).

#### 2.2 Pengertian Kawasan

Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan merupakan wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan (Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Pasal 1).
2. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan (Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Pasal 1).

Selain itu, dikenal kawasan pedesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi (Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Pasal 1).

2. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi (Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Pasal 1).
3. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan (Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Pasal 1).

## **2.3 Perikanan**

### **2.3.1 Definisi Perikanan**

Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

### **2.3.2 Usaha Perikanan**

Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial. Usaha perikanan terdiri dari usaha penangkapan ikan dan usaha pembudidayaan ikan. Adapun untuk usaha pembudidayaan ikan, meliputi jenis kegiatan:

- a. Pembudidayaan ikan di air tawar;
- b. Pembudidayaan ikan di air payau; dan
- c. Pembudidayaan ikan di laut.

(Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan).

## **2.4 Minapolitan**

### **2.4.1 Konsep Minapolitan**

Minapolitan merupakan gabungan kata mina yang berarti ikan dan politan yang berarti polis atau kota, sehingga minapolitan dapat diartikan sebagai kota perikanan (Sunoto, 2010). Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas, dan percepatan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER. 12/ MEN/ 2010).

Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/ atau pemasaran dengan kegiatan pendukung lainnya.

(Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP. 18/ MEN/ 2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan).

Minapolitan secara konseptual mempunyai dua unsur utama yaitu, minapolitan sebagai konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan.

Konsep minapolitan didasarkan pada tiga azas, yaitu demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat, keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil melalui pemberdayaan masyarakat, dan penguatan peran ekonomi daerah dengan prinsip daerah kuat. Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan perumusan kebijakan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan agar pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat dan menempatkan daerah pada posisi sentral dalam pembangunan. Dengan konsep minapolitan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara terintegrasi, efisien, berkualitas, dan berakselerasi tinggi. Berikut penjelasannya:

1. Prinsip Integrasi

Diharapkan dapat mendorong agar pengalokasian sumberdaya pembangunan direncanakan dan dilaksanakan secara menyeluruh atau holistik dengan mempertimbangkan kepentingan dan dukungan *stakeholders*, baik instansi sektoral, pemerintah pusat dan daerah, kalangan dunia usaha maupun masyarakat. Kepentingan dan dukungan tersebut dibutuhkan agar program dan kegiatan percepatan peningkatan produksi didukung dengan sarana produksi, permodalan, teknologi, sumberdaya manusia, prasarana yang memadai, dan sistem manajemen yang baik.

2. Prinsip Efisiensi

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus dilaksanakan secara efisien agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan biaya murah namun mempunyai daya guna yang tinggi. Dengan konsep minapolitan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara efisien dan pemanfaatannya diharapkan akan lebih optimal. Selain itu prinsip efisiensi diterapkan untuk mendorong agar sistem produksi dapat berjalan dengan biaya murah, seperti memperpendek mata rantai produksi, efisiensi, dan didukung keberadaan faktor-faktor produksi sesuai kebutuhan, sehingga menghasilkan produk-produk yang secara ekonomi kompetitif.

### 3. Prinsip Berkualitas

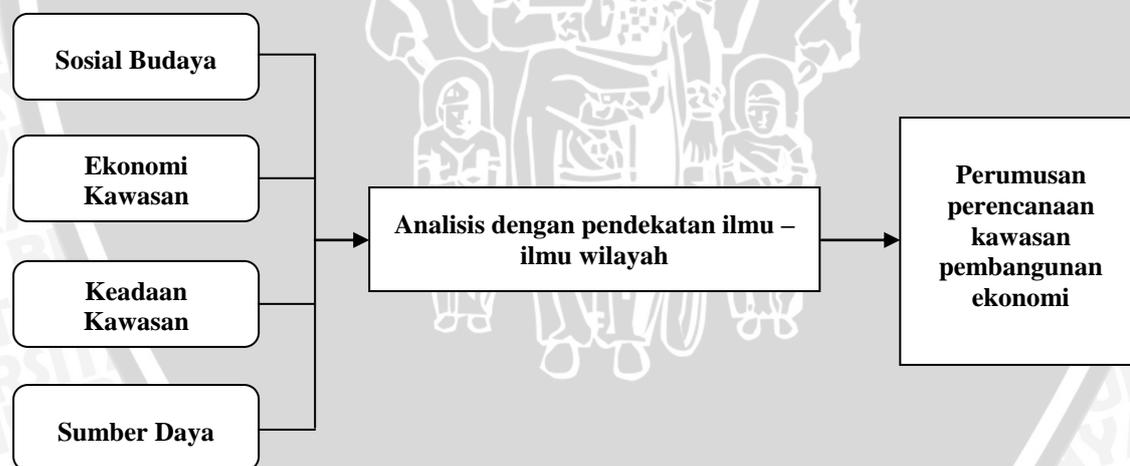
Pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada kualitas, baik sistem produksi secara keseluruhan, hasil produksi, teknologi, maupun sumberdaya manusia. Dengan konsep minapolitan pembinaan kualitas sistem produksi dan produknya dapat dilakukan secara intensif.

### 4. Prinsip Akselerasi Tinggi

Percepatan diperlukan untuk mendorong agar target produksi dapat dicapai dalam waktu cepat, melalui inovasi dan kebijakan terobosan. Prinsip percepatan juga diperlukan untuk mengejar ketinggalan dari negara-negara kompetitor, melalui peningkatan *market share* produk-produk kelautan dan perikanan indonesia tingkat dunia.

(Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP. 18/ MEN/ 2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan).

Konsepsi minapolitan dalam perumusan pembangunannya didasarkan pada empat aspek yaitu sosial budaya, ekonomi kawasan, keadaan kawasan, dan sumber daya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1.



**Gambar 2. 1** Konsepsi Perumusan Pembangunan Minapolitan

(Pedoman Umum Perencanaan Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Minapolitan, 2010)

Basis minapolitan sebagai konsep pembangunan kelautan dan perikanan dengan pendekatan wilayah adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah di Indonesia dibagi menjadi sub-sub wilayah pengembangan ekonomi berdasarkan potensi sumberdaya alam, prasarana, dan geografi;
2. Kawasan ekonomi unggulan pada setiap provinsi dan kabupaten/ kota dibagi menjadi beberapa kawasan ekonomi unggulan bernama minapolitan;
3. Sentra produksi pada setiap kawasan minapolitan terdiri dari sentra produksi dan perdagangan komoditas kelautan, perikanan, dan kegiatan lain yang saling terkait;
4. Unit produksi/ usaha pada setiap sentra produksi terdiri dari unit-unit produksi atau pelaku usaha perikanan produktif.

(Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP. 18/ MEN/ 2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan).

Minapolitan sebagai konsep pengembangan kawasan perikanan dilaksanakan dengan tujuan:

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
2. Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang adil dan merata; dan
3. Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.

(Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP. 18/ MEN/ 2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan).

#### **2.4.2 Kriteria Kawasan Minapolitan**

Kriteria umum yang menjadi acuan dalam perencanaan pengembangan kawasan perikanan budidaya (minapolitan) adalah:

1. Penggunaan lahan untuk kegiatan perikanan harus memanfaatkan potensi yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi dan wajib memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup serta mencegah rusaknya;
2. Wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang untuk dialih fungsikan.
3. Kegiatan perikanan skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki Kajian Amdal sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

4. Kegiatan perikanan skala besar, harus diupayakan menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat;
5. Pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan dan RTRW.

Kriteria khusus pengembangan kawasan perikanan budidaya (minapolitan) antara lain adalah:

1. Memiliki kegiatan ekonomi yang dapat menggerakkan pertumbuhan daerah;
2. Mempunyai sektor ekonomi unggulan yang mampu mendorong kegiatan ekonomi sektor lain dalam kawasan itu sendiri maupun di kawasan sekitarnya;
3. Memiliki keterkaitan ke depan (daerah pemasaran produk-produk yang dihasilkan) maupun ke belakang (suplai kebutuhan sarana produksi) dengan beberapa daerah pendukung;
4. Memiliki kemampuan untuk memelihara sumberdaya alam sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan mampu menciptakan kesejahteraan ekonomi secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
5. Memiliki luasan areal budidaya eksisting minimal 200 Ha.

(Pedoman Umum Perencanaan Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Minapolitan, 2010)

Kawasan minapolitan yang sudah berkembang harus memiliki kriteria seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Suatu kawasan ekonomi yang terdiri atas sentra produksi, pengolahan, dan/ atau pemasaran dan kegiatan usaha lainnya, seperti jasa dan perdagangan;
2. Mempunyai sarana dan prasarana sebagai pendukung aktivitas ekonomi;
3. Menampung dan mempekerjakan sumberdaya manusia di dalam kawasan dan daerah sekitarnya; dan
4. Mempunyai dampak positif terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.

(Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP. 18/ MEN/ 2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan).

Suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi kawasan perikanan budidaya, harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki sumber daya lahan dan perairan yang sesuai untuk mengembangkan komoditi perikanan budidaya, yang dapat dipasarkan atau telah mempunyai pasar.

2. Memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha perikanan, seperti: jalan, sarana pengairan, sumber air baku, pasar, terminal, jaringan telekomunikasi, fasilitas perbankan, sarana produksi pengolahan hasil perikanan, dan fasilitas umum serta fasilitas sosialnya.
3. Mamiliki sumberdaya manusia yang mau dan berpotensi untuk mengembangkan kawasan perikanan budidaya.

(Pedoman Umum Perencanaan Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Minapolitan, 2010)

Suatu kawasan sentra perikanan budidaya yang sudah berkembang harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sebagian besar kegiatan masyarakat di kawasan tersebut didominasi oleh kegiatan perikanan budidaya dalam suatu sistem yang utuh dan terintegrasi mulai dari:
  - a. Subsistem minabisnis hulu yang mencakup: penelitian dan pengembangan, sarana perikanan, permodalan, dan lain-lain;
  - b. Subsistem usaha perikanan budidaya yang mencakup usaha: pembenihan ikan, pembesaran ikan, dan penyediaan sarana perikanan budidaya;
  - c. Subsitem minabisnis hilir yang meliputi: industri-industri pengolahan dan pemasarannya, termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor.
  - d. Subsistem jasa-jasa penunjang (kegiatan yang menyediakan jasa bagi minabisnis) seperti: perkreditan, asuransi, transportasi, pendidikan, penyuluhan, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.
2. Adanya keterkaitan antara kota dengan desa yang bersifat timbal balik dan saling membutuhkan, dimana kawasan perikanan budidaya di pedesaan mengembangkan usaha budidaya dan produk olahan skala rumah tangga, sebaliknya kota menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budidaya dan minabisnis seperti penyediaan sarana perikanan antara lain: modal, teknologi, informasi, peralatan perikanan, dan sebagainya;
3. Kegiatan sebagian masyarakat di kawasan tersebut didominasi oleh kegiatan perikanan budidaya, termasuk di dalamnya usaha industri produk perikanan, perdagangan hasil-hasil perikanan (termasuk perdagangan ekspor), perdagangan minabisnis hulu (sarana perikanan dan permodalan), minawisata dan jasa pelayanan;
4. Infrastruktur yang ada di kawasan diusahakan tidak jauh berbeda dengan di kota.

(Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP. 18/ MEN/ 2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan).

### 2.4.3 Persyaratan Kawasan Minapolitan

Suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai kawasan minapolitan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan Rencana Strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/ atau Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) kabupaten/ kota, serta Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) yang telah ditetapkan;
2. Memiliki komoditas unggulan dibidang kelautan dan perikanan dengan nilai ekonomi tinggi, meliputi:
  - a. Keberadaan komoditas unggulan, yaitu melimpah atau dapat dibudidayakan dengan baik dengan prospek pengembangan tinggi di masa depan.
  - b. Nilai perdagangan komoditas tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:
    - 1) Memiliki pasar; lokal, nasional, atau internasional;
    - 2) Volume atau kemampuan produksi tinggi: dapat atau berpotensi memenuhi permintaan pasar;
    - 3) Tingkat produktivitas tinggi: kemampuan pemanfaatan teknologi untuk mencapai tingkat produktivitas tinggi atau dapat dikembangkan sehingga secara ekonomi menguntungkan;
    - 4) Jumlah pelaku utama/ usaha perikanan relatif besar atau sebagian besar penduduk setempat bekerja dikawasan tersebut;
    - 5) Mempunyai keunggulan komparatif: mempunyai nilai lebih karena keberadaan komoditas, iklim, SDM, dan ongkos produksi murah;
    - 6) Mempunyai keunggulan kompetitif: produk berkualitas dan sistem pemasaran efektif.
3. Letak geografi kawasan yang strategis dan secara alami memenuhi persyaratan untuk pengembangan produk unggulan kelautan dan perikanan, meliputi:
  - a. Lokasi kawasan strategis:
    - 1) Jarak dan sistem transportasi; dan
    - 2) Mempunyai akses terhadap jaringan pengadaan bahan baku, pengolahan, dan pemasaran (mata rantai pemasokan).
  - b. Kawasan yang secara alami cocok untuk usaha perikanan:
    - 1) Kaya SDA, subur, dan air melimpah;

- 2) Tempat pendaratan ikan (tangkap); dan
  - 3) Dekat dengan *fishing ground* (tangkap).
4. Terdapat unit produksi, pengolahan, dan/ atau pemasaran dan jaringan usaha yang aktif berproduksi, mengolah dan/ atau memasarkan yang terkonsentrasi di suatu tempat lokasi dan mempunyai mata rantai produksi pengolahan, dan/ atau pemasaran yang saling terkait, meliputi:
- a. Sistem dan mata rantai produksi perikanan budidaya
    - 1) Keberadaan sejumlah unit produksi ikan budidaya yang aktif berproduksi dan terkonsentrasi di sentra produksi; dan
    - 2) Mata rantai produksi:
      - a) Keberadaan sarana/ lahan produksi: kolam dan tambak yang cukup luas;
      - b) Fasilitas pengairan yang baik dan mencukupi atau potensi pengairan yang mungkin dikembangkan;
      - c) Ketersediaan benih berkualitas tinggi atau kemungkinan pengadaan benih dengan harga murah;
      - d) Ketersediaan pakan dan obat-obatan yang murah;
      - e) Telah diterapkan sistem budidaya yang baik sehingga tingkat produksinya cukup tinggi dan berkualitas;
      - f) Keterlibatan pembudidaya dan para pekerja setempat;
      - g) Sistem distribusi dan pemasaran yang berjalan dengan baik atau dapat segera dikembangkan lebih baik; dan
      - h) Sentra produksi mempunyai skala usaha layak secara ekonomi dan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.
  - b. Sistem dan mata rantai produksi perikanan tangkap
    - 1) Keberadaan sejumlah kapal ikan yang aktif berproduksi dan mendaratkan hasil tangkapannya di lokasi tersebut; dan
    - 2) Mata rantai produksi:
      - a) Hasil tangkapan yang cukup besar dan mempunyai skala ekonomi cukup tinggi;
      - b) Keberadaan sarana tambat, air bersih, tempat pendaratan ikan, dan tempat pelelangan ikan yang memadai;
      - c) Sistem bongkar muat yang memadai atau mungkin dikembangkan dalam waktu dekat;

- d) Keterlibatan nelayan dan para pekerja setempat;
  - e) Kegiatan di lokasi/ pelabuhan perikanan/ TPI mempunyai skala ekonomi dan *multiplier effect* terhadap perekonomian sekitarnya;
  - f) Sistem distribusi dan pemasaran telah berjalan dengan baik atau dapat segera dikembangkan dengan lebih baik; dan
  - g) Sentra produksi mempunyai skala usaha layak secara ekonomi dan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.
- c. Sistem dan mata rantai produksi hilir
- 1) Keberadaan unit-unit pengolahan atau potensi pengembangannya dalam waktu dekat;
  - 2) Keberadaan kelembagaan/ SDM pengawasan mutu;
  - 3) Sistem tata niaga produk hasil olahan dan fasilitas pendukungnya;
  - 4) Keberadaan fasilitas pasar atau sistem pemasaran produk; dan
  - 5) Sistem dan sarana distribusi produk di dalam maupun ke luar kawasan.
5. Tersedianya fasilitas pendukung berupa aksesibilitas terhadap pasar, permodalan, sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan/ atau pemasaran, keberadaan lembaga-lembaga usaha, dan fasilitas penyuluhan dan pelatihan, meliputi:
- a. Permodalan: aksesibilitas nelayan, pembudidaya, dan pengolahan ikan terhadap bantuan permodalan;
  - b. Kelembagaan: lembaga pemerintahan daerah pembina;
  - c. Lembaga usaha: koperasi, kelompok usaha atau usaha skala menengah dan atas;
  - d. Penyuluhan dan pelatihan: lembaga dan SDM penyuluhan dan pelatihan;
  - e. Prasarana pengairan: keberadaan jaringan pengairan (budidaya) utama/ primer, sekunder, atau lainnya sebagai pendukung sistem pengairan di kawasan;
  - f. Energi: jaringan listrik yang memadai; dan
  - g. Teknologi tepat guna: penerapan teknologi tepat guna yang mampu meningkatkan daya saing.
6. Kelayakan lingkungan diukur berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi dampak negatif, dan potensi terjadinya kerusakan di lokasi di masa depan, meliputi:
- a. Kondisi sumberdaya alam (daya dukung dan daya tampung)

- b. Dampak atau potensi dampak negatif terhadap lingkungan; dan
  - c. Sesuai tata ruang daerah dan nasional.
7. Komitmen daerah, berupa kontribusi pembiayaan, personil, dan fasilitas pengelolaan dan pengembangan minapolitan, meliputi:
    - a. Sesuai RENSTRA dan Tata Ruang Daerah dan Nasional
    - b. Masuk ke dalam RPIJM
    - c. Ditetapkan oleh Bupati/ Walikota
    - d. Penyusunan rencana induk, rencana perusahaan, dan rencana tindak
    - e. Kontribusi anggaran APBD atau sumberdaya lain yang sah
    - f. Keberadaan kelambagaan dinas yang membidangi kelautan dan perikanan dengan dukungan SDM yang memadai
    - g. Berkoordinasi dengan provinsi dan pusat
  8. Keberadaan kelembagaan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan, meliputi:
    - a. Keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu dinas yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan;
    - b. Kelompok kerja yang menangani pengembangan kawasan minapolitan.
  9. Ketersediaan data dan informasi tentang kondisi dan potensi kawasan, meliputi:
    - a. Mempunyai data dan informasi mengenai sumber daya kelautan dan perikanan serta data dan informasi terkait;
    - b. Mempunyai sistem pencatat data statistik dan geografis di bidang kelautan dan perikanan

(Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP. 18/ MEN/ 2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan).

### **2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Perikanan Budidaya**

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kegiatan perikanan budidaya antara lain: faktor kebijakan wilayah, sumber daya manusia, sumber daya alam, infrastruktur dan sarana prasarana, serta kelembagaan (Pedoman Umum Perencanaan Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Minapolitan Tahun 2010).

#### **a. Kebijakan Daerah**

Kebijakan daerah pengembangan kawasan bertujuan untuk mengetahui arahan kebijakan pengembangan kawasan yang bersangkutan baik secara sektoral maupun regional. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan arahan pengembangan. Oleh karena itu, selain dilakukan pengkajian terhadap

tujuan dan sasaran pengembangan kawasan perikanan budidaya (Minapolitan) di kabupaten/ kota yang bersangkutan, juga dilakukan pengkajian terhadap rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota serta program-program sektoral untuk melihat peranan kawasan dalam pembentukan pola dan struktur ruang kabupaten/ kota.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam pengembangan kawasan minapolitan. Berdasarkan faktor ini dapat diketahui sebaran/ distribusi, struktur, kualitas, karakteristik masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk, kendala dalam pengembangan, serta potensi sumber daya manusia yang dapat dikembangkan.

c. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan faktor penting dalam pengembangan kawasan minapolitan yang perlu dipertimbangkan. Pertimbangan pada faktor ini berkaitan dengan kondisi geografis dalam mendukung pengembangan produk budidaya. Sumber daya alam dapat berupa sumber daya hayati dan non-hayati.

d. Sarana Prasarana

Sarana prasarana merupakan faktor yang dibutuhkan dalam pengembangan suatu kawasan. Semakin lengkap sarana prasarana memberikan kemudahan dan meningkatkan efisiensi bagi para pelaku kegiatan yaitu para pembudidaya dalam memenuhi kebutuhan kegiatan budidaya. Sarana ditunjukkan dengan kegiatan berupa jasa dan prasarana ditunjukkan dengan infrastruktur yang tersedia.

e. Kelembagaan

Struktur organisasi/ kelembagaan berperan penting dalam pengembangan kawasan perikanan budidaya. Sebab dengan hal tersebut kita dapat melihat kapasitas pemerintah kabupaten/ kota dalam menyelenggarakan pembangunan yang mencakup struktur organisasi dan tata laksana pemerintahan, sumber daya manusia, organisasi pembudidaya ikan, sarana dan prasarana kerja, produk-produk kebijakan, serta organisasi non-pemerintah dan perguruan tinggi.

## 2.6 Kesesuaian Lahan

Kesesuaian lahan adalah kesesuaian suatu lahan dalam pemanfaatannya untuk suatu kegiatan. Kesesuaian lahan penentuannya didasarkan dari sifat fisik lingkungannya, yang meliputi iklim, tanah, topografi, hidrologi, dan atau drainase yang sesuai untuk usaha tani atau komoditas tertentu yang produktif. (Reyes, 2006)

Menurut Conant (dalam Rustiadi et al., 2009), evaluasi lahan dapat dikaitkan dengan tujuan lain selain pertanian (tanaman), seperti kehutanan, budidaya perikanan, irigasi, dan keteknikan (infrastruktur).

### 2.7 Ketersediaan Lahan

Lahan menurut FAO (dalam Reyes, 2006), merupakan bagian dari lansekap yang meliputi lingkungan fisik termasuk iklim, topografi, tanah, hidrologi, dan vegetasi alami yang semuanya memiliki pengaruh dalam peningkatan potensi pemanfaatannya.

Ketersediaan lahan jika berdasarkan pengertian lahan yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan ketersediaan lingkungan fisik yang terdiri dari iklim, topografi, tanah, hidrologi, dan vegetasi alami untuk dapat dimanfaatkan pada waktu yang telah ditentukan. (Reyes, 2006)

### 2.8 Locational Quotient

*Locatioanal quotient* merupakan analisis yang digunakan untuk menentukan basis-basis ekonomi suatu daerah yang memiliki kemampuan untuk memnuhi kebutuhan dalam maupun ke luar daerah tersebut. (Tarigan, 2005)

Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien menggunakan hasil produksi. Perbandingan relatif ini dinyatakan secara matematika sebagai berikut:

$$LQ = \frac{S_i / N_i}{S / N}$$

Dengan:

LQ : *Locational Quotient*

$S_i$  : Jumlah produksi sub sektor-i di daerah yang diselidiki

$S$  : Jumlah seluruh produksi di daerah yang diselidiki

$N_i$  : Jumlah produksi sub sektor-i di wilayah yang lebih luas dimana daerah yang diselidiki menjadi bagainnya

$N$  : Jumlah seluruh produksi di wilayah yang lebih luas dimana daerah yang diselidiki menjadi bagiannya

### 2.9 Growth-Share

*Growth* merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan produktivitas dari tahun ke tahun, sedangkan *share* merupakan analisis yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik struktur ekonomi di suatu wilayah (Sukirno, 1985).

$$\text{Rumus: Growth} = \frac{T_n - T_{n-1}}{T_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

$T_n$  = Jumlah produksi tahun ke-n

$T_{n-1}$  = Jumlah produksi tahun awal

$$\text{Rumus: Share} = \frac{NP_1}{NP_2} \times 100\%$$

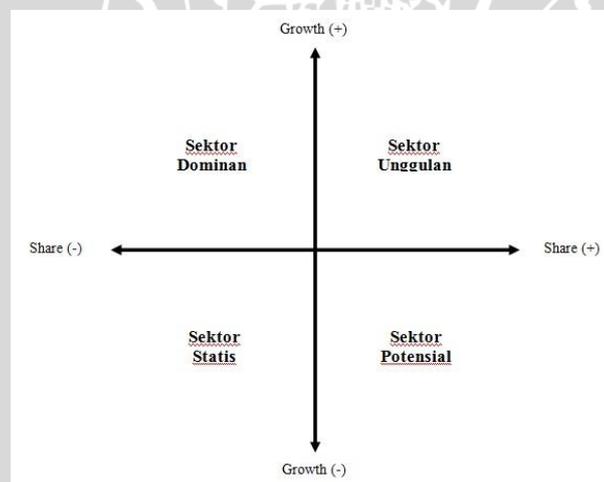
Keterangan:

$NP_1$  = Nilai produksi sub sektor-i di daerah yang diselidiki

$NP_2$  = Nilai produksi sub sektor-i di wilayah yang lebih luas

Untuk menyatakan kontribusi yang diberikan itu besar atau tidak adalah apabila *share* bernilai  $x > 2$  diberi tanda (+) dan dinyatakan kontribusi yang diberikan besar dan bila *share* bernilai  $1 < x < 2$  diberi tanda (-) dan dinyatakan kontribusi yang diberikan kecil (rendah).

Hasil dari *growth* dan *share* berupa tanda dijadikan kordinat untuk menentukan posisi pada diagram *growth* dan *share*. Diagram tersebut akan menentukan status dari suatu komoditas apakah komoditas tersebut sektor unggulan, sektor dominan, sektor statis, atau sektor potensial.



Gambar 2. 2 Diagram *Growth* dan *Share*

## 2.10 Struktur dan Pola Ruang

Struktur ruang adalah hierarki fungsi suatu lokasi dalam kegiatan ekonomi. Hierarki dalam struktur ruang menggambarkan besarnya daya tarik atau luasnya wilayah pengaruh. Struktur ruang merupakan pemicu berbagai aktivitas di dalam wilayah dan sangat berpengaruh dalam menentukan arah pemanfaatan guna lahan di masa yang akan datang. Penentuan struktur ruang ditentukan berdasarkan kedekatan

lokasi ke pusat kota dan sarana prasarana dari kawasan studi terkait perikanan budidaya (Tarigan, 2005). Struktur ruang juga dapat didefinisikan sebagai susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi (Rustiadi et al., 2009).

Struktur ruang kawasan minapolitan terbagi menjadi kawasan minapolis, kawasan sentra produksi, dan kawasan hinterland/ pendukung. Kawasan minapolis dapat berupa ibu kota kecamatan yang merupakan pusat kegiatan perdagangan dan jasa. Sedangkan kawasan sentra produksi dapat berupa desa yang memiliki keunggulan dibandingkan desa lain yang sama-sama sebagai penghasil produk perikanan budidaya (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP. 18/ MEN/ 2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan).

Pola ruang adalah gambaran dari kumpulan atau kaitan secara ruang antara sumber daya dan pemanfaatannya. Pola ruang erat kaitannya dengan aspek-aspek persebaran secara ruang sumber daya dan kegiatan pemanfaatannya menurut lokasi, setiap jenis kegiatan manusia menyebar dengan luas yang beragam dan tingkat penyebarannya yang beragam pula (Rustiadi et al., 2009). Pemanfaatan ruang kawasan pada kawasan minapolitan akan terbagi menjadi zona minapolis yang berfungsi sebagai kawasan pusat pelayanan dan jasa, zona sentra produksi sebagai pengumpul hasil budidaya, dan zona hinterland/ pendukung sebagai kawasan produksi perikanan budidaya (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP. 18/ MEN/ 2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan).

Analisis struktur dan pola ruang bertujuan untuk mengetahui distribusi pemanfaatan ruang dan menentukan hierarki fungsi kawasan subsektor perikanan budidaya di Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

### **2.11 Uji Validitas dan Reliabilitas**

Uji validitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui alat ukur yang digunakan untuk mengukur data suatu penelitian valid. Valid bermakna alat ukur memiliki korelasi dengan data yang diukur. Uji reliabilitas merupakan uji yang dilakukan dengan tujuan mengetahui apakah alat ukur yang valid pada suatu penelitian dapat digunakan sebagai alat ukur pada penelitian yang sama (Sugiyono, 2010)

Uji validitas dan reliabilitas pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan perikanan budidaya di Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar valid dan reliabel.

## 2.12 Analytical Hierarchy Process (AHP)

*Analytical Hierarchy Process* merupakan suatu alat pendukung dalam penentuan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung penentuan keputusan ini akan menjabarkan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks dalam bentuk hierarki. Menurut Saaty (1993), hierarki didefinisikan sebagai suatu bentuk penyajian permasalahan yang kompleks dalam bentuk struktur multi level yaitu level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub-kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Dengan hierarki, suatu masalah yang kompleks dikelompokkan sesuai dengan tingkatannya, kemudian diatur menjadi suatu bentuk hierarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis.

*Analytical Hierarchy Process* sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan metode lain karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Struktur yang berhierarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai pada sub-kriteria yang paling dalam.
2. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambilan keputusan.
3. Mempertahankan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan.

Prinsip dasar analisis hierarki proses memiliki prinsip dasar yang harus dipahami, antara lain:

1. Dekomposisi

Setelah mendefinisikan permasalahan, maka perlu dilakukan dekomposisi, yaitu memecah permasalahan yang utuh menjadi unsur-unsurnya, sampai yang terkecil.

2. *Comparative Judgment*

Prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkatan di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari analisis hierarki proses, karena akan berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. Hasil dari penilaian ini lebih mudah disajikan dalam bentuk matriks *pairwise comparison*.

3. *Synthesis Of Priority*

Tiap matriks *pairwise comparison* dicari *vector eigen*/ ciri untuk mendapatkan prioritas lokal. Karena matriks *pairwise comparison* terdapat pada setiap tingkat,

maka untuk mendapatkan prioritas global harus dilakukan sintesis di antara prioritas lokal. Prosedur melakukan sintesis berbeda menurut bentuk hierarki.

#### 4. *Logical Consistency*

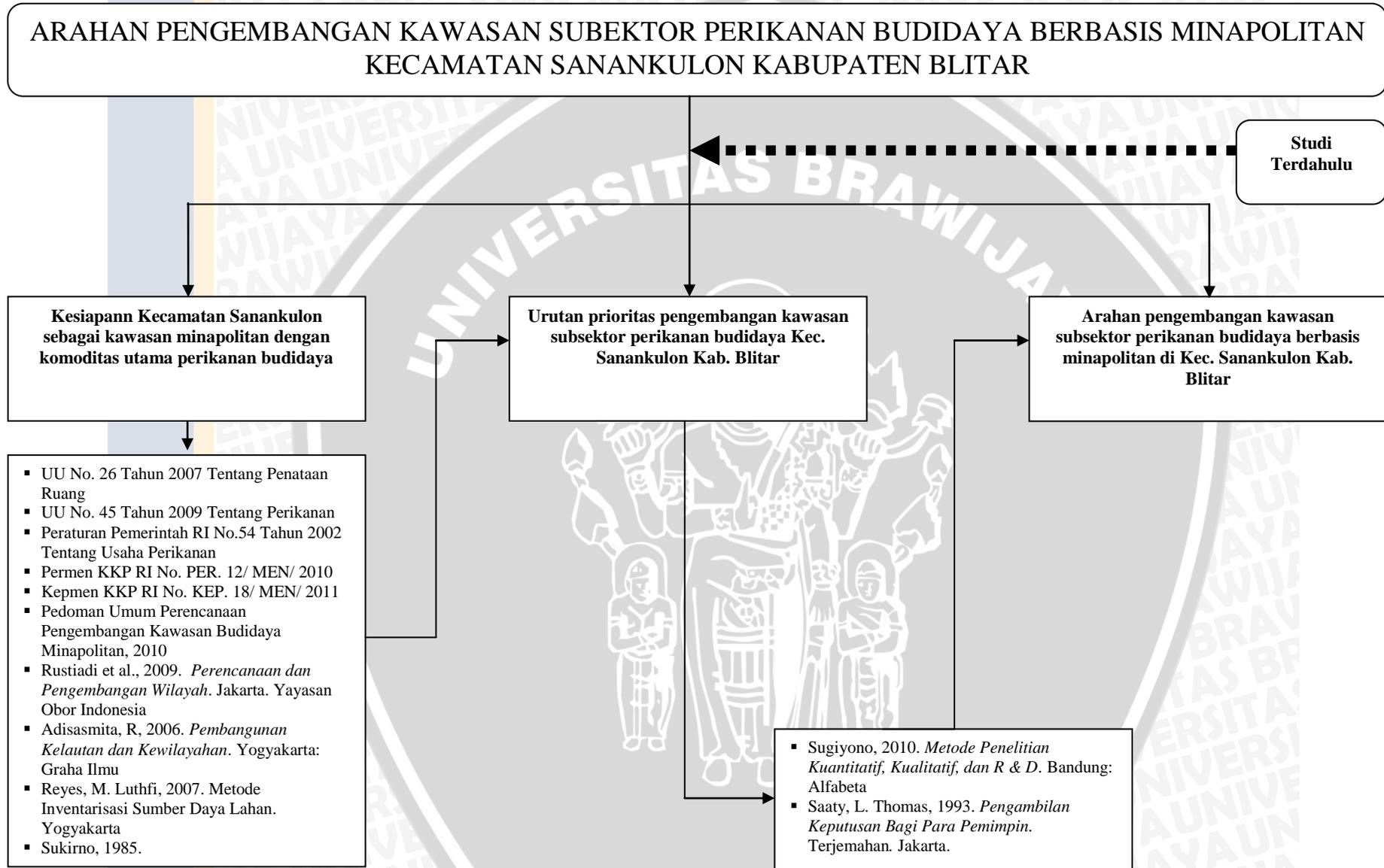
Konsistensi memiliki dua makna. Makna pertama adalah bahwa obyek-obyek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai keseragaman dan relevansinya. Kedua adalah tingkat hubungan antar obyek-obyek yang didasarkan pada kriteria tertentu.

*Analytical Hierarchy Process* digunakan untuk menentukan tingkat prioritas dari tiap variabel yang berpengaruh terhadap pengembangan kawasan subsektor perikanan budidaya di Kecamatan Sanankulon.

### 2.13 Kerangka Teori

Kerangka teori bertujuan menggambarkan alur penggunaan teori dalam penelitian arahan pengembangan subsektor perikanan budidaya Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.2.





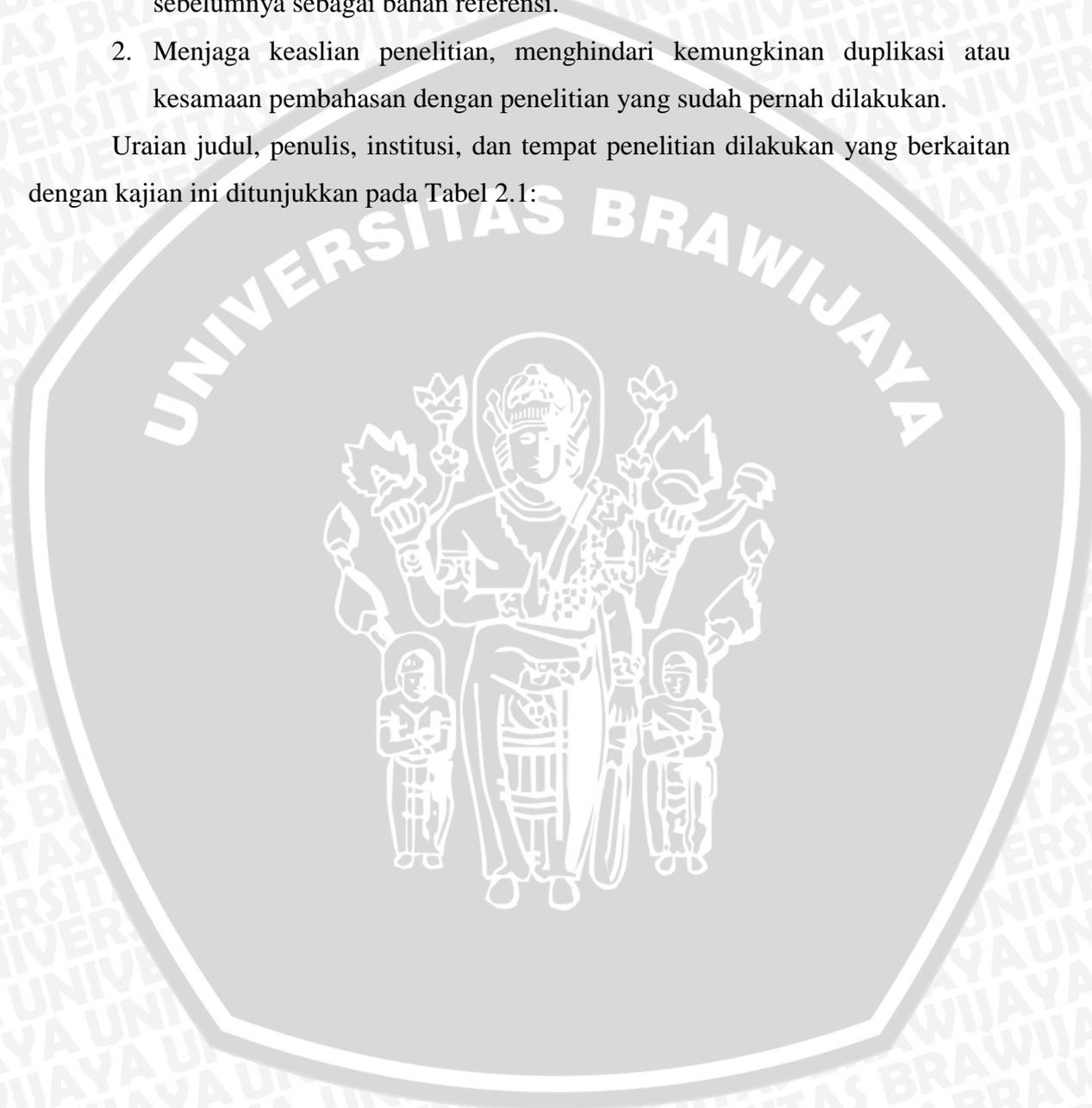
**Gambar 2. 3 Kerangka Teori**

## 2.14 Studi Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan kajian yang akan dilakukan. Kajian penelitian terdahulu dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Mempermudah proses penelitian dengan menggunakan hasil-hasil penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi.
2. Menjaga keaslian penelitian, menghindari kemungkinan duplikasi atau kesamaan pembahasan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan.

Uraian judul, penulis, institusi, dan tempat penelitian dilakukan yang berkaitan dengan kajian ini ditunjukkan pada Tabel 2.1:



Tabel 2. 1 Studi Terdahulu

No.	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Arahan Pengembangan Sentra Produksi Budidaya Perikanan di Kecamatan Brondong (Dziyau Fathkin Najih, 2005/ PWK-UB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Karakteristik fisik</li> <li>▪ Karakteristik non-fisik</li> <li>▪ Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sentra produksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Analisis sumperimposed</li> <li>▪ Analisis <i>linkage system</i></li> <li>▪ Analisis faktor</li> <li>▪ Analisis <i>development</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengidentifikasian karakter fisik dan non-fisik kawasan sentra produksi</li> <li>▪ Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sentra produksi</li> <li>▪ Strategi pembangunan perikanan budidaya</li> <li>▪ Pemanfaatan ruang perikanan budidaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cakupan wilayah studi pada penelitian sebelumnya adalah Kecamatan Brondong. Sedangkan pada penelitian kali ini cakupan wilayah studinya adalah Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar</li> <li>▪ Cakupan ruang lingkup yang diteliti. Pada penelitian sebelumnya lebih difokuskan pada konsep pengembangan kawasan sentra produksi. Sedangkan pada penelitian kali ini lebih difokuskan pada pengembangan kawasan perikanan budidaya berbasis minapolitan</li> </ul>
2.	Pengembangan Kawasan Minapolitan Kecamatan Puger (Elfira Virginia/ PWK-UB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistem dan mata rantai produksi hulu</li> <li>▪ Sistem dan mata rantai produksi hilir</li> <li>▪ Sistem penunjang</li> <li>▪ Potensi dan masalah pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Analisis potensi wilayah</li> <li>▪ Analisis sosial ekonomi</li> <li>▪ Analisis <i>linkage system</i></li> <li>▪ Analisis struktur wilayah</li> <li>▪ Analisis penentuan sentra</li> <li>▪ Analisis potensi masalah</li> <li>▪ Analisis akar masalah dan akar tujuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Arahan pengembangan pusat dan sub-pusat kegiatan perikanan</li> <li>▪ Arahan pengembangan kegiatan minapolitan perikanan tangkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cakupan wilayah studi pada penelitian sebelumnya adalah Kecamatan Puger. Sedangkan pada penelitian kali ini cakupan wilayah studinya adalah Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar</li> <li>▪ Cakupan sektor yang diteliti pada penelitian sebelumnya, difokuskan pada perikanan tangkap. Sedangkan pada penelitian kali ini sektor yang diteliti difokuskan pada budidaya perikanan darat.</li> <li>▪ Cakupan ruang lingkup yang diteliti. Pada penelitian sebelumnya lebih difokuskan pada konsep pengembangan kawasan minapolitan pada ruang lingkup perikanan tangkap. Sedangkan pada penelitian kali ini lebih difokuskan pada pengembangan kawasan perikanan budidaya darat berbasis minapolitan</li> </ul>
3.	Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya Rumput Laut Berbasis Minapolitan di	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Karakteristik fisik</li> <li>▪ Karakteristik kependudukan</li> <li>▪ Kelayakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Analisis deskriptif</li> <li>▪ Analisis sumperimposed</li> <li>▪ Analisis LQ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengetahui karakteristik kawasan budidaya rumput laut di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cakupan wilayah studi pada penelitian sebelumnya adalah Kecamatan Jerowaru. Sedangkan pada penelitian kali ini cakupan wilayah studinya adalah Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar</li> </ul>

No.	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur (Sofyan Hadi Pramana, 2013/ PWK-UB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ekonomi</li> <li>▪ Karakteristik daya dukung lahan</li> <li>▪ Karakteristik subsistem minabisnis</li> <li>▪ Kesesuaian kawasan</li> <li>▪ Karakteristik struktur tata ruang</li> <li>▪ Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Analisis <i>growth-share</i></li> <li>▪ Analisis kajian pengembangan kawasan</li> <li>▪ Analisis faktor</li> <li>▪ Analisis <i>development</i></li> </ul>	<p>Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan komoditas rumput laut di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur</li> <li>▪ Mengetahui arahan pengembangan kawasan budidaya rumput laut berbasis minapolitan di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cakupan sektor yang diteliti pada penelitian sebelumnya, difokuskan pada budidaya rumput laut. Sedangkan pada penelitian kali ini sektor yang diteliti difokuskan pada budidaya perikanan darat.</li> <li>▪ Cakupan ruang lingkup yang diteliti. Pada penelitian sebelumnya lebih difokuskan pada pengembangan kawasan budidaya rumput laut berbasis minapolitan. Sedangkan pada penelitian kali ini lebih difokuskan pada pengembangan kawasan budidaya perikanan darat berbasis minapolitan</li> </ul>

## Contents

BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pengertian Wilayah.....	11
2.2 Pengertian Kawasan.....	11
2.3 Perikanan.....	12
2.3.1 Definisi Perikanan.....	12
2.3.2 Usaha Perikanan.....	12
2.4 Minapolitan.....	12
2.4.1 Konsep Minapolitan.....	12
2.4.2 Kriteria Kawasan Minapolitan.....	15
2.4.3 Persyaratan Kawasan Minapolitan.....	18
2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Perikanan Budidaya.....	21
2.6 Kesesuaian Lahan.....	22
2.7 Ketersediaan Lahan.....	23
2.8 <i>Locational Quotient</i> .....	23
2.9 <i>Growth-Share</i> .....	23
2.10 Struktur dan Pola Ruang.....	24
2.11 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	25
2.12 <i>Analytical Hierarchy Process (AHP)</i> .....	26
2.13 Kerangka Teori.....	27
2.14 Studi Terdahulu.....	29

Gambar 2. 1 Konsepsi Perumusan Pembangunan Minapolitan ..... 14

Gambar 2. 2 Diagram *Growth* dan *Share*..... 24

Gambar 2. 3 Kerangka Teori..... 28

Tabel 2. 1 Studi Terdahulu..... 30

